

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah bermulanya dibentuk DPR RI yakni ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Belanda memiliki sebuah parlemen bernama *Volksraad*. Kemudian tiba pada tahun 1942, tepatnya pada 8 Maret dimana penjajahan yang telah berlangsung selama 350 tahun itu berakhir dan memasuki era penjajahan Jepang, ini berimbas pada posisi *Volksraad* yang tak lagi mendapat pengakuan. Dalam waktu yang sempit itu, petinggi Indonesia memanfaatkannya untuk belajar bagaimana praktik parlemen yang baik serta mulai melakukan pembentukan partai-partai politik. Saat itu, era berjuang mendapatkan kemerdekaan telah dimulai. Selanjutnya, DPR RI bermula dari pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNIP) yang keberadaannya eksis di era tahun 1945 hingga 1949. Fungsi utamanya yakni membantu presiden pada masa-masa setelah merdeka, yang selanjutnya mengemban perubahan tugas sebagai legislatif. KNIP pertama kali diresmikan pada tahun 1945 tepatnya di 29 Agustus, yang kemudian tanggal tersebut diperingati menjadi hari lahir DPR RI.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga yang dimaksud dalam UUD 1945 masih belum terbentuk. Sebagai pengisi ruang kosong, maka dibentuklah KNIP yang mengemban tugas membantu berjalannya presiden untuk menjadi pimpinan di negara ini. Pada sidang pertamanya, dilaksanakan dibawah pimpinan Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua. Ketika masa peralihan setelah merdekanya Indonesia yang berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun, akhirnya pemilihan umum untuk pertama kalinya di gelar pada 1955, wakil rakyat dipilih untuk menduduki lembaga perwakilan.

Anggotanya merupakan bagian dari partai politik yang mengajukan diri saat pemilihan umum. Kedudukan DPR berada pada tingkat pusat, sementara yang menduduki bagian provinsi dan kabupaten adalah DPRD. Mengacu pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto UU No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD menetapkan aturan di bawah ini:

- a. Anggota DPR berjumlah 560 orang;
- b. Anggota DPRD provinsi paling tidak 35 orang dan tidak lebih dari 100 orang;
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota paling tidak 20 orang dan tidak lebih dari 50 orang.

Peresmian sebagai anggota dilakukan dengan putusan presiden. Kemudian, anggota akan menempati domisi di ibukota negara dengan lama menjabat lima tahun. Sebagai suatu lembaga yang mendapati peran sebagai perwakilan rakyat, mengemban beratnya tanggungan yang pemenuhannya harus dilakukan secara responsive dan demokratis. Meninjau dari perspektif yuridis, sejatinya sebagai lembaga yang berkontribusi dibentuknya suatu Undang-Undang, besar harapan dapat menghasilkan produk hukum yang mengacu pada hukum dengan tidak melawan aturan UU lain yang telah ada. Selanjutnya, paling utama yaitu tidak melawan konstitusi.

Dalam melaksanakan fungsinya, terdapat tiga fungsi utama yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

Erat kaitannya dengan program legislasi nasional (prolegnas), yakni bagian dari komponen dalam merencanakan dibentuknya suatu undang-undang yang penyusunannya telah direncanakan, terstruktur, dan saling berkaitan. Berisi list RUU yang dibahas selama lima tahun kedepan oleh DPR sebagai pemilik kuasa pembentukan UU serta pemerintah.

2. Fungsi Anggaran

Kewenangan saat menyusun dan menetapkan anggaran penetapan dan belanja negara ditentukan UUD 1945 pasal 23. Saat melaksanakan fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah dengan melewati berbagai tahapan.

3. Fungsi Pengawasan

Bertujuan sebagai pengawas saat dilaksanakannya undang-undang dan aturan yang ditetapkan badan eksekutif. Perwujudan fungsi ini dalam bentuk rapat yang meliputi, rapat kerja, mendengar pendapat, serta mendengar pendapat umum, kemudian melaksanakan kunjungan atau reses, serta pemberi pertimbangan saat diangkatnya suatu pejabat.

Visi Misi DPR-RI

Visi :

Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam membangun tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Misi :

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif
2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, dan akomodatif

Fraksi

Sebagai penyamaan keberagaman kepentingan anggota, pembentukan fraksi atau kelompok perlu dilakukan, dalam kelompok tersebut berisi anggota yang memiliki kesamaan dalam memandang politik, ini akan memaksimalkan tugas serta wewenang anggota.

Tugas utama fraksi adalah melakukan koordinasi untuk pengoptimalan tingkat kerja yang efektif dan efisien. Juga mengemban tanggung jawab sebagai evaluator kualitas kerja anggota serta membuat laporan hasil evaluasi. Seperti Gerindra yang menjadi salah satu Fraksi dalam DPR-RI.

Awal mula Partai Gerindra lahir, bertujuan utk dapat meningkatkan derajat rakyat dan mengentaskan kemiskinan, imbas dari tidak bertanggung jawabnya seseorang dan tidak peduli akan kesejahteraan. Fadli Zond dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo pada saat itu sedang melakukan perjalanan bersama, dan membahas terkait politik Indonesia, yang seakan kehilangan nilai demokrasi akibat dari oknum yang merusaknya. Ketika membahas politik tersebut, muncullah ide untuk membuat partai baru dengan harapan baru. tujuan dibuatnya partai agar negara ini dapat dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar peduli akan rakyat, tidak hanya demi suatu golongan semata. Gagasan untuk membuat partai baru ini didiskusikan oleh orang-orang Hashim dan

Prabowo. Banyak hambatan dan penolak pada saat berdiskusi terkait membuat partai baru.

Akhirnya, pada Desember tahun 2007, bermula dari rumah yang saat ini berfungsi sebagai markas IPS tepatnya di Bendungan Hilir. Berkumpul nama-nama yang setuju dan membicarakan terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membuat partai baru. Setelah perdebatan dan proses yang panjang, akhirnya partai Gerindra pun dideklarasikan pada 6 Februari 2008. Partai Gerindra ini mengabdikan untuk bangsa dan negara untuk dapat memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia.



Gambar 2. 1 Logo Partai Gerindra

Sumber : www.partaigerindra.or.id

Logo dari Partai Gerindra sendiri muncul dari sebuah ide untuk menggunakan lambang burung garuda, namun terhambat oleh banyaknya partai yang telah lebih dulu menggunakan lambang tersebut. Prabowo Subianto memiliki gagasan untuk tetap mempertahankan lambang garuda, tetapi hanya kepalanya saja. Perpaduan antara nama Gerindra dengan burung Garuda yang memberi penggambaran, mandiri, semangat, kemakmuran serta keberanian yang dimiliki rakyat. Kepala yang dibuat menghadap arah kanan mencerminkan beani untuk mengambil sikap dan tindakan. Lalu, jumlah sisi pada bagian leher sebanyak 17, 8 buah jambur serta jengger, jumlah bulu pada telinga 4 serta bingkai yang membentuk segi lima melambangkan kemerdekaan Indonesia.

Kotak persegi panjang yang membingkai keseluruhan logo, dengan garis hitam dan dasar berwarna putih melambangkan kesucian. Kemudian, eksistensi burung yang memiliki warna kuning cenderung emas di tengahnya

mencerminkan kondisi makmur. Lalu, untuk narasi diatas burung garuda bertuliskan “partai” lalu dibawah berutliskan “gerindra” denga ntulisan warna merah. Dibawahnya lagi, bertuliskan “GERAKAN INDONESIA RAYA” YANG BERWARNA HITAM.

2.2 Struktur Organisasi Partai Gerindra



Gambar 2. 2 **Struktur DPP Partai Gerindra**

Sumber : www.partaigerindra.or.id

Partai Gerindra memiliki tiga dewan pengurus yakni Dewan Pengurus Pusat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang. Praktikan berada masuk kedalam sturktur Dewan Pengurus Pusat atau DPP. Ketiga dewan pengurus tersebut memiliki badan-badan dan sayap partai. Badan-badan merupakan departemen yang ada didalam partai Gerindra yakni terdapat tujuh departemen. Tujuh departemen tersebut yakni: Badan Seleksi Organisasi (BSO), Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA), Badan Komunikasi (BAKOM), Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT), Badan Disiplin Partai, dan Badan Kajian dan Kebijakan Partai.

Kemudian terdapat sayap partai yang biasa disebut sebagai kendaraan politik, yang memiliki fungsi untuk menyuarakan kepada masyarakat ketika nanti terdapat pemilihan umum. Sayap partai Gerindra yakni terdapat:

1. Tunas Indonesia Raya (TIDAR)

TIDAR adalah sebuah organisasi untuk mewedahi pemuda tunas bangsa, sehingga akan dapat dibangun dan diajak untuk berkontribusi kepada bangsa. TIDAR sebagai penampung dan penyalur berbagai pendapat dan

mewujudkannya dalam bentuk kehiatan yang baik. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh TIDAR harus dapat membangun generasi muda yang kokoh untuk menuju bangsa yang kokoh.

2. Perempuan Indonesia Raya (PIRA)

PIRA merupakan sebuah organisasi dari sayap partai Gerindra yang berfokus pada aspirasi perempuan. Organisasi ini bertujuan untuk mengajak perempuan Indonesia untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara Indonesia, terutama pada bidang berpolitik.

3. Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) (Katolik & Protestan)

GEKIRA merupakan bagian dari Gerindra, tujuannya untuk mewedahi aspirasi masyarakat kristiani Indonesia didalamnya meliputi agama Protestan dan Katolik. GEKIRA ingin kedepannya bisa mewujudkan eksistensi dan persekutuan dari seluruh umat kristiani sesuai dengan harapan dari Indonesia.

4. Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA)

Sama seperti GEKIRA, GEMIRA adalah sebuah organisasi sayap dari partai Gerindra yang dibentuk untuk mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat muslim di Indonesia.

5. Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR)

PETIR merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh partai Gerindra. Terbentuknya organisasi ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat etnis Tionghoa. Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai yang mengakomodir masyarakat Etnis Tionghoa.

6. Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA)

Satria merupakan organisasi sayap parati Gerindra yang bertujuan untuk menegakan Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. SATRIA bertugas untuk melakukan penghimpunan, penggalangan, pengembangan, serta peningkatan SDM Indonesia yang lebih maju dan serta ikut membantu penanggulangan bencana nasional dalam segi sosial.

7. Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA)

Merupakan gerakan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang merupakan bagian dari sayap partai gerindra. Gerakan ini didominasi oleh agama Hindu. Tetapi gerakan ini beranggotakan bukan dari agama Hindu saja, tetapi memiliki anggota beragama Buddha, Konghuchu, dan aliran kepercayaan.

2.2.1 Struktur Organisasi DPP Partai Gerindra



Gambar 2. 3 Struktur DPP Partai Gerindra

Sumber : www.partaigerindra.or.id

DPP Partai Gerindra memiliki berbagai macam divisi, yang dibagi menjadi beberapa kategori, dengan penanggung jawab setiap kategori tersebut. DPP Partai Gerindra di pimpin oleh tiga dewan utama yakni Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. Ketiga dewan tersebut yang memantau seluruh kegiatan atau pekerjaan divisi dibawahnya. Dewan tersebut berkoordinasi atau melakukan komunikasi langsung oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang berada tepat dibawahnya. Kemudian, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berada sejajar dengan Badan-Badan serta Ketua Harian. Badan-Badan yang dimaksud adalah unit kerja di Partai Gerindra. Lalu, ketua harian yang mengurus kegiatan dan proses kerja sehari-hari. Badan-Badan dan Ketua Harian tidak memiliki bawahan atau beridir sendiri didalam struktur organisasi.

Kemudian, dibawah pengawasan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, terdapat Bendahara Umum dan Sekretaris Jendral. Bendahara Umum, mengurus kegiatan yang berkaitan dengan keuangan atau administrasi keuangan. Sedangkan Sekretaris, bertugas berkaitan dengan keadministrasian, persidangan dan keahlian. Kemudian dibawahnya juga terdapat Ketua Bidang yang berhubungan dengan bidang yang mereka pertanggung jawabkan.

Pada DPP Partai Gerindra terdapat divisi-divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada Partai Gerindra, sebagai berikut:

1. Ketua Umum

Ketua umum memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan seluruh kegiatan, keputusan dan kebijakan organisasi. Ketua umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh penyelenggara pada organisasi dan proker yang mereka lakukan. Ketua umum harus dapat mempertanggung jawabkan secara internal dalam rapat organisasi.

2. Wakil Ketua Umum

Wakil ketua umum memiliki tugas sebagai pembantu ketua dan bertanggung jawab untuk menggantikan ketua dalam seluruh kegiatan, pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi, jika ketua sedang berhalangan untuk hadir.

3. Bendahara Umum

Bendahara umum memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan seluruh kegiatan, keputusan dan dapat mempertanggungjawabkan kepada ketua. Tanggung jawab yang dimiliki bendahara umum adalah melakukan koordinasi pada kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan dan kekayaan dalam organisasi.

4. Sekretaris Jendral

Sekretaris jendral memiliki tugas untuk mendukung kelancara dalam melaksanakan wewenang dan juga tugas Ketua maupun wakil ketua di bidang administrasi, persidangan dan keahlian.

5. Ketua-Ketua Bidang

Ketua bidang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan seluruh kegiatan, keputusan dan kebijakan organisasi dalam bidang

pengurusannya. Ketua bidang memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh penyelenggara yang berada dibawah naungannya dan program kerja yang dilakukan.

2.1. Kegiatan Umum

Komisi merupakan sebuah alat kelengkapan DPR-RI yang sifatnya tetap sesuai dengan ditetapkan pada saat dimulainya tahun persidangan. Dalam periode tahun 2019 hingga 2024, komisi memiliki jumlah 11, yang di mana pada kerja profesi ini praktikan berada di komisi I. Ruang lingkup dan tugas komisi I DPR-RI adalah pertahanan, Luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelegen. Dengan itu komisi I DPR-RI memiliki 16 Mitra kerja antara lain:

1. Kementerian Pertahanan (Kemhan),
2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu),
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo),
4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU,
5. Badan Intelijen Negara (BIN),
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas),
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla),
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas),
10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI),
11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI),
12. Dewan Pers,
13. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat,
14. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat),
15. Lembaga Sensor Film (LSF),
16. Perum LKBN Antara.

Ruang lingkup Komisi I terbilang cukup luas melihat dari banyaknya mitra kerja. Komisi I juga memiliki kegiatan yang diselenggarakannya, seperti:

1. Rapat Kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya
4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
5. Rapat Kerja Gabungan
6. Kunjungan Kerja (Kunker)
7. Kunker Gabungan
8. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
9. Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
10. Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.



